



**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & KEHUMASAN  
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Jalan Tanah Abang I No. 1 Blok C Lt. 2  
Telp. (021) 3441417 Fax. (021) 3441417

## **GUNTINGAN BERITA**



HARI : **Rabu** ..... UNIT KERJA : .....

TGL : **03 November 2021** .....

Berita Media Cetak

**472 Pelanggar Tata Ruang Bakal Diajukan Ke Pengadilan**

Pos Kota - Pembangunan - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -

# 472 Pelanggar Tata Ruang Bakal Diajukan ke Pengadilan

**GAMBIR (Poskota)** - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) akan menggelar sidang yustisi bagi para pelanggar tata ruang. Hal ini guna memberikan efek jera bagi warga yang lalai menegakkan aluran.

Wakil Walikota Jakpus, Irwandi mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dengan melakukan rapat koordinasi dengan UKPD terkait dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Untuk sidangnya, akan kita koordinasikan dengan Pengadilan. Sudin Citata sudah melakukan pendataan warga yang melanggar tata ruang, nanti akan kita lakukan pemanggilan," kata Irwandi, Selasa (2/11).

Irwandi menjelaskan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertana-

han (Citata) mencatat ada sebanyak 472 pelanggar tata ruang.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap kali terjadi dalam proses penataan tata ruang, antara lain pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, pelanggaran penataan tata ruang, bisa berupa upaya menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Diharapkan sidang yustisi bisa memberi efek jera bagi warga pelanggar tata ruang. **(Cr05/ta)**

Berita Media Cetak

## Pemkot Jakpus Gelar Sidang Yustisi Bagi Pelanggar Tata Ruang

Koran Jakarta - Pemerintahan - BIRO HUKUM - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -

# Pemkot Jakpus Gelar Sidang Yustisi Bagi Pelanggar Tata Ruang

JAKARTA – Pemerintah Kota Jakarta Pusat siap menggelar sidang yustisi bagi para pelanggar tata ruang guna memberikan efek jera bagi warga yang lalai aturan tersebut.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) terkait dan Pengadilan Negara Jakarta Pusat.

“Untuk sidangnya, akan kita koordinasikan dengan Pengadilan. Sudin Citata sudah melakukan pendataan warga yang melanggar tata ruang, nanti akan kita lakukan pemanggilan,” kata Irwandi di Jakarta, kemarin.

Irwandi menjelaskan bahwa Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) mencatat ada sebanyak 472 pelanggar tata ruang di wilayah Jakarta Pusat.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap kali terjadi dalam proses penataan tata ruang antara lain pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, pelanggaran penataan tata ruang bisa berupa upaya menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Karena itu, pelaksanaan sidang yustisi diharapkan memberi efek jera bagi warga pelanggar tata ruang.

Pemkot Jakarta Pusat juga akan menyerahkan sanksi pengenaan denda para pelanggar berdasarkan hasil persidangan. “Denda akan ditentukan dari ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Denda dari hasil yustisi akan diserahkan ke kas Negara,” kata Irwandi. ■ Ant/S-2

Berita Media Cetak

## Sidang Yustisi Pelanggar Tata Ruang

Warta Kota - Pembangunan - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN - Provinsi DKI Jakarta - Tata Ruang Kota Jakarta - 03 November 2021 -

# Sidang Yustisi Pelanggar Tata Ruang

### Gambir, Warta Kota

Banyaknya masyarakat yang melanggar tata ruang saat melakukan pembangunan memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat membuat kebijakan atau peraturan baru. Demikian diungkap Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Irwandi menjelaskan, rencananya para pelanggar tata ruang di wilayah Jakarta Pusat harus mengadiri sidang sidang Yustisi. "Hal ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melanggar tata ruang saat proses pembangunan," ujar Irwandi.

Irwandi menjelaskan, sebelum penindakan tata ruang itu dilakukan, pihaknya melakukan persiapan terlebih dahulu. Misalnya melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait dan pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Dari Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat sudah melakukan pendataan warga yang melanggar tata ruang. Nanti petugas terkait akan melakukan pemanggilan. Sementara, untuk sidangnya akan kita koordinasikan de-

ngan PN Jakarta Pusat," ujar Irwandi, Selasa (2/11).

Irwandi mengungkapkan, berdasarkan catatan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat, terdapat ada 472 pelanggar tata ruang yang ada di Jakarta Pusat. Namun, jumlah itu masih terus dilakukan pendataan oleh Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat agar semuanya diberikan sanksi yang sama. "Kita gelar adakan sidang yustisi untuk menegakkan aturan tata ruang di Jakarta Pusat" ucap Irwandi. (m26)

Berita Media Cetak

## GOR Johar Baru Jadi Tempat Parkir Liar

Pos Kota - Pemerintahan - SATPOL PP - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -

# GOR Johar Baru Jadi Tempat Parkir Liar

**GELANGGANG** Olah-raga Remaja (GOR) di Jalan Raya Rawa Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat berubah menjadi lokasi parkir kendaraan warga. Akibatnya sejumlah pengunjung GOR kesulitan untuk parkir di lokasi tersebut.

Kondisi tersebut dikeluhkan pengunjung yang disampaikan ke redaksi Poskota, yang isinya "GOR Johar Baru berubah fungsi jadi tempat parkir kendaraan warga. Sehingga pengunjung kesulitan untuk parkir. Mohon perhatian

**Kami Berencana Merevitalisasi, agar Tak Dipakai Buat Parkir**

Kepala Unit Pengelola Terpadu (UPT) Gelanggang Olah Raga Jakarta Pusat, Hari Widiatmoko

pihak terkait. (082225825xxx).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Unit Pengelola Terpadu (UPT) Gelanggang Olah Raga Jakarta Pusat, Hari Widiatmoko membenarkan bahwa di area halaman

GOR dipenuhi kendaraan milik warga.

Dirinya juga menyayangkan mengenai keadaan tersebut. Pihaknya berencana merevitalisasi GOR tersebut agar tidak lagi dipakai parkir liar oleh warga.

"Kami pernah mau menertibkan justru ditentang dan takut jadi gesekan. Semoga rencana revitalisasi segera terealisasi, jika sudah jadi nanti tidak akan ada lagi ormas yang mengelola," tegasnya ketika dikonfirmasi, Selasa (2/11). (cr-05/ta)

Berita Media Cetak

## Sanksi Tilang Uji Emisi Menuai Protes

Jawa Pos - Ekonomi - DINAS PERHUBUNGAN - Provinsi DKI Jakarta - Uji Emisi - 03 November 2021 -

# Sanksi Tilang Uji Emisi Menuai Protes

**GAMBIR** - Rencana Pemprov DKI untuk menerapkan sanksi bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi per 13 November mendapat banyak sorotan dari publik. Publik menilai kebijakan itu tidak disertai dengan sosialisasi dan persiapan yang matang. Bahkan, banyak warga yang menilai aplikasi *E-Uji Emisi* belum mumpuni dalam memberikan informasi untuk mendukung kebijakan tersebut.

Aplikasi yang sudah tersedia di Google Play itu menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bengkel dan pelayanan uji emisi. Namun, mayoritas penduduk mengeluhkan aplikasi tersebut yang tidak informatif. Bahkan, mereka menilai aplikasi itu dibuat secara tidak profesional.

Kolom *review* aplikasi tersebut dibanjiri protes masyarakat. Misalnya, J. Andreas. Dia berkomentar, regulasi berlaku untuk roda dua dan empat, tetapi pilihan di aplikasi hanya roda empat. "Daftar bengkel juga sangat terbatas. *Rating* ini bukan hanya untuk *apps*, tetapi untuk yang terhormat Pemprov DKI. Tolong ketika mau *release* suatu kebijakan, dipersiapkan dulu matang-matang sarana dan prasarana



penunjang. Nanti ujung-ujungnya warga yang kena imbas tilang karena belum uji emisi. *What a shame dude*," tulisnya dalam kolom komentar.

Kemudian, R. Oktariono menuliskan cerita tentang usahanya menghubungi sejumlah bengkel penyedia jasa uji emisi seperti yang tercantum dalam aplikasi tersebut, tetapi berujung kekecewaan. "Ngabisin pulsa buat *nelpoin* satu-satu bengkel daerah

Jaksel yang ada fasilitas uji emisi motor. Ujung-ujungnya nihil. Peraturannya *nggak* diimbangi dengan layanan yang memadai," tulisnya.

Kritik tak kalah pedas datang dari E. Tedjasukmana. "Beres (bengkel resmi, Red) Honda Puri di lis sebagai bengkel yang bisa uji emisi, tapi ternyata kok *nggak* bisa ya? @.@ *nggak* guna banget dong *apps*-nya. Cari bengkel *aja* salah. SOSIALISASI PROGRAM *nggak* oke

nih pemerintah! *Udah* mepet di bulan mau diberlakukan sanksi, masak tahunya dr *WhatsApp*. *Udah* gitu, info lainnya kudu cari-cari sendiri, bengkelnya *nggak* banyak, info uji emisi gratis *nggak* jelas selain tanggal *nggak* diinfo jamnya. *Apps*-nya *nggak* guna *pulak* salah info bengkel," tulisnya dalam kolom komentar.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menuturkan, penerapan kebijakan tersebut sudah dipersiapkan dengan matang. "Semua juga sudah disosialisasikan melalui media sosial yang kami miliki. Kami sudah umumkan juga mulai sekarang bahwa 13 November bagi kendaraan yang belum lolos uji emisi segera laksanakan. Kalau tidak akan diberi sanksi," terangnya di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (2/11).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menuturkan, sebelum sanksi diterapkan, Pemprov DKI harus melakukan uji coba sistem secara penuh. Mulai sosialisasi hingga simulasi kesiapan bengkel. "Harus dipastikan masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik. Paling tidak berikan jangka waktu 3-6 bulan, jadi tidak langsung diterapkan," tambahnya. (rya/fiq/gin/col/ilo)



PROSES PENGECEKAN: Petugas menguji emisi kendaraan roda empat di parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/11). Publik menilai kebijakan itu tidak disertai dengan sosialisasi dan persiapan yang matang. Foto bawah, warga menunggu giliran motornya diuji petugas.

Berita Media Cetak

## UMP DKI Tahun 2022 Diumumkan 19 November 2021

Pos Kota - Ekonomi - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -

# UMP DKI Tahun 2022 Diumumkan 19 November 2021

## ◆ Tunggu Data BPS Terkait Pertumbuhan Ekonomi

**GAMBIR (Poskota)** - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertran) DKI Jakarta, bakal mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2022. Penyampaian dilakukan menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait masalah pertumbuhan ekonomi.

"Berdasarkan pengumuman yang bakal dilakukan pada 21 November 2021 dan di tanggal tersebut hari Minggu, maka akan diumumkan dihari Jumat tanggal 19 November 2021," ungkap Kepala Dinas Nakertran DKI Jakarta, Andri Yansyah saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021).

"Untuk pembahasan sendiri sudah mulai 2 sampai 3 kali pertemuan, sekarang kita tunggu rilis dari BPS Insya Allah tanggal 5 November termasuk PDB itu kita bahas lagi," terang

Dikatakannya, apa yang menjadi aspirasi buruh atau pekerja telah ditampungnya dan dija-



Buruh menggeruduk Balaikota DKI minta kenaikan UMP 2022.

Poskota/Deny

dikan bahan diskusi dengan Dewan Pengubah. Karena, dalam memutuskannya harus melibatkan Dewan Pengupah.

"Sebenarnya banyak permasalahan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu dibahas, tidak hanya pengupahan," pungkasnya.

Andri Yansyah menambahkan, selain

pembahasan pembahasan rapat secara formal, pihaknya juga telah melakukan pembahasan pembahasan secara informal. Termasuk pembahasan pembahasan dengan serikat pekerja, juga dengan asosiasi.

"Cuma pembahasan seperti apa saya tidak bisa berikan penjelasan secara detail kepada teman-

teman media, tetapi upaya itu tetap kita lakukan baik secara formal maupun informal," katanya.

Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjukrasa di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021).

Para buruh dari penjurur Ibu Kota itu, menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 10 persen atau sekitar Rp5 juta.

"10 persen bukan angka yang tinggi," ucap Winarso, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, kepada awak media. (deny/ta)

Berita Media Cetak

**Razia Pedagang Di Trotoar Jalan Proklamasi**

Pos Kota - Pemerintahan - SATPOL PP - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -

## Razia Pedagang di Trotoar Jalan Proklamasi

- ▶ Di Jalan Proklamasi, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Bank Mandiri Taspen banyak pedagang kaki lima di trotoar. Akibatnya, pejalan kaki nggak bisa lewat dan terkesan semrawut. Bahkan ada pejalan kaki yang terserempet motor saat berjalan di depan lokasi tersebut. Sementara Satpol PP cuek aja, entah kenapa. Kami khawatir jika dibiarkan makin marak pedagang kaki lima di tempat itu. Dirazia dong Pak! Terima kasih, (08138571xxxx)



Berita Media Cetak

## Berita Foto : Masih Sepi

Warta Kota - Ekonomi - KAWASAN PENGELOLA KAWASAN MONAS - Provinsi DKI Jakarta - Bazaar Lenggang Jakarta Monas - 03 November 2021 -



Warta Kota/Henny Lempit

**MASIH SEPI** — Pedagang makanan dan souvenir di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat sudah membuka dagangannya walupun masih sepi pembeli, Selasa (2/11). Para pedagang berharap Jakarta yang sudah masuk PPKM level 1, Monas dibuka bagi untuk wisatawan .

Berita Media Cetak

## Cermin Rambu Lalu Lintas Dicorat-Coret

Pos Kota - Ekonomi - DINAS PERHUBUNGAN - Provinsi DKI Jakarta - - 03 November 2021 -



### **Cermin Rambu Lalu Lintas Dicorat-coret**

CERMIN rambu lalu lintas di Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat dijadikan sarana vandalisme membuat fungsi rambu menjadi kurang berfungsi.  
(081212463xxx)



**HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Hari : Selasa                      Tanggal : 2                      Bulan : November                      Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : **1** 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31                      Kolom : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

## Loksem 66 Matraman Dalam Bakal Ditata

Selasa, 02 November 2021 Anita Karyati



(Foto: Anita Karyati - Beritajakarta.id)

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Baznas Bazis DKI Jakarta akan melakukan penataan Lokasi Sementara (Loksem) 66 atau samping Masjid Jami Matraman, Jalan Matraman Dalam II, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

**Kami ingin penataan ini bisa terintegrasi karena lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami Matraman yang bersejarah**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting menuturkan, pihaknya telah melakukan peninjauan terkait penguatan konsep desain untuk penataan atau revitalisasi tersebut.

"Jadi nanti setelah ditata akan ada tamannya. Kemudian trotoarnya juga kita tata kembali. Konsep penataan kami buat kekinian agar lokasi ini lebih sering didatangi pengunjung," ujar Ferizan, Selasa (2/11).

Menurutnya, penataan akan dilakukan secara bertahap, sehingga 45 pedagang yang ada tetap bisa berjualan.

"Kami ingin penataan ini bisa terintegrasi karena lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami Matraman yang bersejarah," katanya.

Dia menambahkan, tujuan penataan dilakukan agar kawasan tersebut menjadi lebih rapi dan terlihat lebih modern. Para pedagang di Loksem 66 Matraman Dalam juga akan mendapatkan pembinaan.

Pengelola Loksem 66 Matraman Dalam, Zaenal mengaku senang dengan rencana penataan lokasi tersebut. Terlebih, lokasinya berada dekat dengan Masjid Jami Matraman yang bersejarah. Ia berharap setelah dilakukan penataan, lokasi tempatnya berjualan akan lebih ramai pengunjung.

"Kami tidak keberatan dengan rencana penataan ini. Kami berharap penataan bisa dilakukan secepatnya," tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada





# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 2 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : **1** 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Kolom : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

## Perkembangan Data Kasus dan Vaksinasi COVID-19 di Jakarta per 2 November 2021

Selasa, 02 November 2021 Aldi Geri Lumban Tobing

(Foto: Istimewa - Beritajakarta.id)



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus berupaya mengendalikan pandemi COVID-19. Seiring dengan menerapkan 3T, vaksinasi COVID-19 juga digalakkan pada sejumlah kelompok prioritas. Kendati demikian, masih dibutuhkan peran serta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

### Seminggu terakhir ada 163.519 orang dites PCR

Mengingat, vaksinasi COVID-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan, masih terdapat kemungkinan tertular dan menularkan virus COVID-19 jika longgar terhadap protokol kesehatan dalam keseharian. Hal ini terlihat dari kasus positif yang masih fluktuatif dan kini mengalami kenaikan. Butuh kerja bersama untuk memutus rantai penularan ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 22.065 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 19.417 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 77 positif dan 19.340 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 30.233 orang dites, dengan hasil 10 positif dan 30.223 negatif.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. "Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 163.519 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 652.099 per sejuta penduduk," terang Dwi, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 58 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 937 (orang yang masih dirawat/ isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 861.700 kasus. Perlu diketahui, hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : **Selasa**                      Tanggal : **2**                      Bulan : **November**                      Tahun : **2021**

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos 2. JawaPos 3. Kompas 4. Koran Sindo 5. Koran Tempo	6. LampuHijau 7. Media Indonesia 8. Nonstop 9. Poskotanews.com 10. Pelita	11. Rakyat Merdeka 12. Republika 13. Suara Karya 14. Sentana 15. Warta Kota	16. HarianTerbit 17. SinarHarapan 18. Beritajakarta.id
--------------	--	---	---	--

**Halaman :** ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,                      **Kolom :** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 847.201 dengan tingkat kesembuhan 98,3%, dan total 13.562 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Untuk *positivity rate* atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 0,4%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12,4%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 10.907.474 orang (122,0%), dengan proporsi 67% merupakan warga ber-KTP DKI dan 33% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 10.046 orang. Sedangkan, total dosis 2 kini mencapai 8.422.163 orang (94,2%), dengan proporsi 70% merupakan warga ber-KTP DKI dan 30% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 23.758 orang.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PPKM lainnya, seperti pelanggaran di restoran/rumah makan, serta pelanggaran perkantoran, tempat usaha, dan tempat industri. Sanksi yang diberlakukan berupa kerja sosial, denda, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

Berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta pada 1 November 2021, telah dilakukan penertiban operasi masker dengan total denda sebesar Rp 1.400.000, serta 1 tempat usaha lainnya yang ditutup sementara. Harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, untuk melakukan vaksinasi, warga dapat langsung ke tempat vaksinasi. Namun, untuk mempercepat proses vaksinasi, warga disarankan mendaftar *online* melalui aplikasi JAKI atau situs [corona.jakarta.go.id/vaksinasi](https://corona.jakarta.go.id/vaksinasi). Dengan mendaftar secara *online*, warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan *pre-screening* tes *online*.

Untuk menemukan tempat vaksinasi, warga juga mengeceknya melalui aplikasi google maps. Hanya dengan menuliskan “vaksin COVID-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih.

Adapun kategori warga 18+ yang dapat divaksinasi di DKI Jakarta adalah:

- Warga ber-KTP DKI Jakarta,
- Warga ber-KTP dari luar DKI Jakarta, tetapi berdomisili di DKI Jakarta (membawa keterangan domisili diperoleh dari petugas RT, tidak harus dari ketua RT),
- Pekerja di DKI Jakarta yang ber-KTP dari luar DKI Jakarta (membawa keterangan dari tempat kerja).

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs [corona.jakarta.go.id/kolaborasi](https://corona.jakarta.go.id/kolaborasi).

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



**HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**  
**SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Hari : Selasa                      Tanggal : 2                      Bulan : November                      Tahun : 2021

<b>MEDIA :</b>	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Beritajakarta.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,                      Kolom : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

# Jakarta Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Selasa, 02 November 2021 Anita Karyati



(Foto: doc - Beritajakarta.id)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan hari ini. Warga diminta waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi.

**Waspada potensi hujan disertai kilat/petir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada sore hari**

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada sore hari," tulis peringatan dini BMKG di laman resminya, Selasa (2/11).

Untuk prakiraan cuaca siang hari nanti, hujan ringan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara; hujan petir di Jakarta Selatan; hujan sedang di Jakarta Timur; serta cerah berawan di Kepulauan Seribu.

Pada malam hari, berawan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur serta hujan ringan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan pada dini hari, hujan ringan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu serta berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Adapun untuk rata-rata suhu udara di Jakarta hari ini antara 23-33 derajat celsius dengan kelembapan udara mencapai 65-100 persen.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 2 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Pelanggar Tata Ruang Akan di Sidang Yustisi

Perekonomian & Pembangunan 2 Nov. 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi. Foto: Firdha PKL

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (Jakpus) akan menggelar sidang yustisi bagi para pelanggar tata ruang.

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi mengatakan, saat ini Pemkot Administrasi Jakarta Pusat tengah melakukan persiapan sidang yustisi dengan melakukan rapat koordinasi dengan UKPD terkait dan pihak pengadilan Jakpus.

Menurutnya, usai koordinasi ini akan melakukan rapat lanjutan untuk persiapan sidang. “Dari Sudin Citata sudah melakukan pendataan warga yang melanggar tata ruang, nanti akan kita lakukan pemanggilan. Untuk sidangnya akan kita koordinasikan dengan pengadilan,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (2/11).

Irwandi mengatakan target dari sidang yustisi ini sebanyak 472 pelanggar yang ada di wilayah Jakpus. Sidang yustisi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi warga yang lalai menegakan aturan tata ruang. “Kita adakan yustisi untuk menegakan aturan tata ruang di Jakpus,” jelasnya.

Terkait denda yang akan dikenakan bagi para pelanggar, lanjutnya, tergantung dari hasil persidangan nanti. Denda akan ditentukan dari ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan. “Denda dari hasil yustisi akan diserahkan ke kas negara,” tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada





# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa                      Tanggal : 2                      Bulan : November                      Tahun : 2021

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman :** ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,                      **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Tahun 2022, Irwandi Optimis Target 200 Jakpreneur Jakpus Tercapai

Perekonomian & Pembangunan 2 Nov, 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



*Prorduk Jakpreneur binaan Kecamatan Gambir. Foto: Malik Maulana*

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Irwandi mengaku optimis target 200 Jakpreneur dapat tercapai pada Tahun 2022 nanti.

Menurutnya, target Jakpreneur 200 ribu wirausaha baru sesuai Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, sudah terpenuhi untuk wilayah Jakarta Pusat.

"RPJMD itu 200 ribu dalam lima tahun, sekarang sudah melebihi target. Udah tercapai dan lewat targetnya itu," ungkapnya saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Selasa (2/11). Ia juga mengatakan, di masa PPKM level 1 ini perekonomian sudah mulai bergerak begitupun dengan kegiatan Jakpreneur di wilayah Jakpus.

Menurutnya, di wilayah Jakarta Pusat tengah menjalankan program bazar, pameran, dan pelatihan baik online maupun offline untuk Jakpreneur.

"Semua kegiatan Jakpreneur jalan terus bazar pameran, online tetap dilakukan yang offline kita tambahkan, bahkan kita akan laksanakan bazar lagi," tandasnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

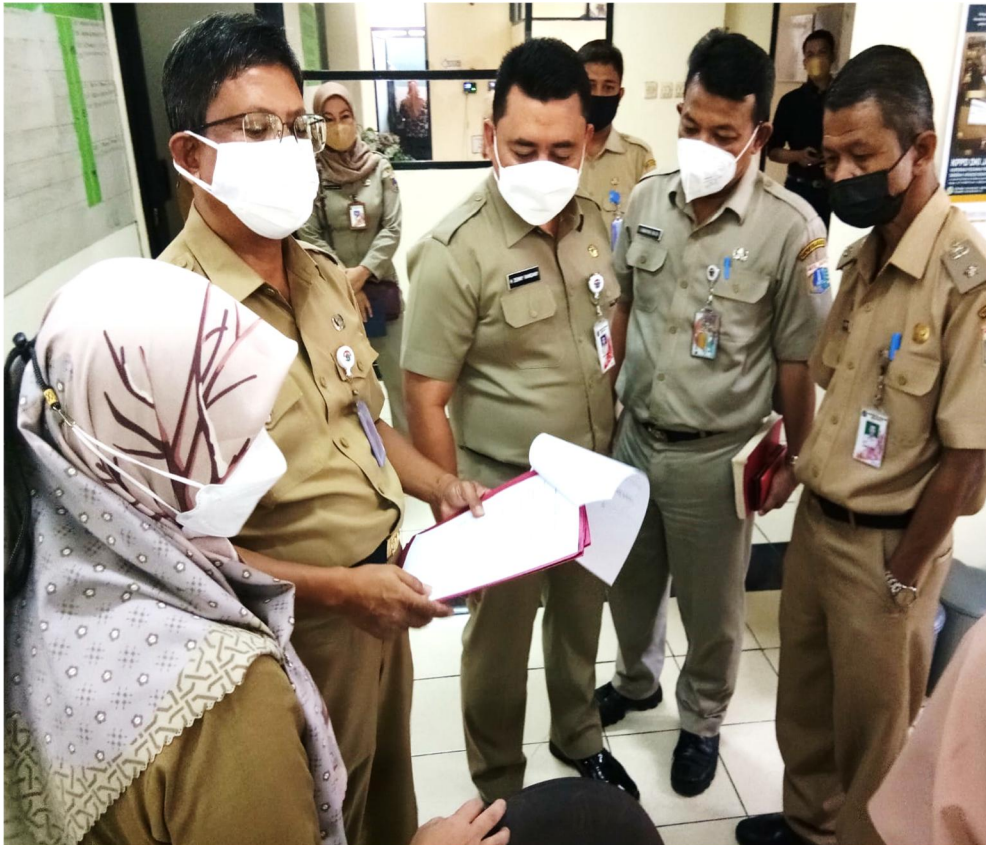
Hari : Selasa Tanggal : 2 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Aspem: PNS Harus Disiplin Dalam Masuk Kerja dan Jam Kerja

Pemerintahan 2 Nov, 2021 Reporter: H. A. Daelani | Editor: Andreas Pamakayo



Pembinaan dan monitoring kinerja pegawai Kelurahan Bungur. Foto: pusat.jakarta.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus disiplin dalam masuk kerja dan jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian dikatakan Asisten Pemerintahan (Aspem) Setko Administrasi Jakarta Pusat Denny Ramdany saat melakukan pembinaan dan monitoring kinerja pegawai kelurahan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, di aula Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Selasa (2/11).

"Jangan ada keterlambatan atau pulang cepat saat masuk kerja. Jika sering terlambat dan pulang cepat, nantinya akan diakumulasi kehadirannya. Sebanyak 1.350 menit atau setara tiga hari kerja akan dikenakan hukuman disiplin dan berpengaruh pada e-Kinerja sehingga bisa tidak dapat TKD minimal satu bulan," jelas Denny.

"Jadi saya imbau kepada para PNS di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tolong usahakan jangan sampai terlambat dan pulang cepat, karena ini berpengaruh pada e-Kinerja. Peraturan ini sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS masuk kerja dan jam kerja," tegasnya.

Lebih lanjut Denny menuturkan, pertemuan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk bersilaturahmi karena merupakan satu keluarga dalam satu payung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serta diatur oleh Pergub nomor 152 tahun 2019 tentang organisasi tata kerja Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta bahwa wali kota, camat, dan lurah Pergub-nya adalah satu.

"Jadi tugas wali kota membina kecamatan. Kecamatan harus membina kelurahan, nah inilah nuansa silaturahmi kita datang. Dengan cara silaturahmi kita bisa bicara dari hati ke hati terkait kendala, permasalahan yang dihadapi, kita benahi supaya pelayanan di masyarakat bisa lebih baik dan berjalan lancar," ungkapnya.

Dalam kunjungan ke kantor Kelurahan Bungur Aspem didampingi Kabag Pemerintahan Efiskal, Kabag Kepegawaian Ketatalaksanaan Pelayanan Publik (KKPP) Munjir Munaji, Kabag Hukum Any, Kasuban Kepegawaian Yanu serta Kabag Keuangan H Risan H Muhtar.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa Tanggal : 2 Bulan : November Tahun : 2021

MEDIA :	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

Halaman : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Kolom : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

## Pompa Keliling Disiapkan Antisipasi Genangan di Jalan Abdul Jalil

Perekonomian & Pembangunan 2 Nov, 2021 Reporter: Nelly Marlianti | Editor: Andreas Pamakayo



Pompa keliling disiapkan antisipasi genangan di Jalan Abdul Jalil. Foto: pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan pompa keliling (*mobile*) guna mengantisipasi genangan yang terjadi di kawasan Abdul Jalil, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang.

Camat Tanah Abang Dicky Suherlan menerangkan, pemasangan pompa keliling ini merupakan skema pengendalian genangan di kawasan Abdul Jalil yang sering kali terdampak saat hujan deras.

Menurutnya pompa keliling ini berkapasitas 300-400 liter perdetik. "Pompa keliling milik Sudin SDA berkapasitas 300L/detik, pompa kolaborator 400L/detik, dan pompa keliling *quick respon* 300L/detik," ungkapnya, saat dikonfirmasi, Selasa (2/11).

Dicky mengharapkan dengan adanya pompa keliling ini membuat empat RT yang terdampak genangan bisa ditangani. Keempat RT ini di antaranya, RT 10, 11,14 di RW 9 dan RT 14 RW 11.

Ia juga mengatakan, sejauh ini keempat RT ini masih aman dari genangan karena intensitas hujan masih ringan. "Jadi nanti pada saatnya harus digunakan dalam kondisi banjir itu sudah ada skemanya dan ada skenarionya," jelasnya.

Untuk uji coba sendiri, menurutnya, sudah dilakukan namun untuk teruji secara pasti menunggu hujan lebat.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa      Tanggal : 2      Bulan : November      Tahun : 2021

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman :** ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

## Satpol PP Jaring 23 Pelanggar Tertib Masker di Pasar Cempaka Putih

Pemerintahan 2 Nov, 2021 Reporter: Malik Maulana | Editor: Andreas Pamakayo



*Pelanggar tertib masker di Pasar Cempaka Putih diberikan sanksi sosial. Foto: Malik Maulana*

Satpol PP melakukan kegiatan rutin setiap harinya dengan melaksanakan razia tertib masker, di depan Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (2/11).

"Kegiatan ini rutin dilakukan setiap harinya. Penurunan level PPKM tidak mengurangi kegiatan tertib masker, karena kegiatan ini guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker saat beraktivitas," kata Pengendali Lapangan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat Agus Aprianto saat ditemui di lokasi. Ada 23 orang pelanggar protokol kesehatan (proses yang terjaring tidak memakai masker).

Bagi para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker, lanjutnya, diberikan sanksi sosial berupa membersihkan atau menyapu jalan sekitar lokasi. Sementara bagi yang memakai masker, namun tidak sesuai peruntukannya diberikan teguran.

Agus juga berharap dengan adanya kegiatan tertib masker ini dapat mencegah meningkatnya penyebaran Covid-19.

"Dengan kegiatan ini diharapkan kepada warga lebih sadar dalam pemakaian masker, karena masker dapat mencegah penularan virus Covid-19 dengan begitu seluruh warga DKI Jakarta dapat terbebas juga dari pandemi Covid-19," Agus berharap.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada



# HUBUNGAN MASYARAKAT

## PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Hari : Selasa      Tanggal : 2      Bulan : November      Tahun : 2021

<b>MEDIA</b>	1. Indo Pos	6. LampuHijau	11. Rakyat Merdeka	16. HarianTerbit
	2. JawaPos	7. Media Indonesia	12. Republika	17. SinarHarapan
	3. Kompas	8. Nonstop	13. Suara Karya	18. Pusat.jakarta.go.id
	4. Koran Sindo	9. Poskotanews.com	14. Sentana	
	5. Koran Tempo	10. Pelita	15. Warta Kota	

**Halaman :** ① 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,      **Kolom :** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

### Satgas Bina Marga Kecamatan Kemayoran Perbaiki Trotoar di Jalan Kepu Timur Raya

Perekonomian & Pembangunan 2 Nov, 2021 Reporter: Zaki Ahmad Thohir | Editor: Andreas Pamakayo



Satgas Bina Marga Kecamatan Kemayoran melakukan perbaikan trotoar. Foto: pusat.jakarta.go.id

Satuan Tugas (Satgas) Bina Marga Kecamatan Kemayoran kembali melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum.

Kali ini trotoar di Jalan Kepu Timur Raya, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mendapat giliran diperbaiki.

Petugas Koordinator Lapangan Satgas Bina Marga Kecamatan Kemayoran Sazali Chaidir mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka peremajaan trotoar.

Menurutnya, untuk yang di Jalan Kepu Timur Raya ini merupakan hasil patroli Tim Satgas yang bertugas keliling mencari fasilitas umum yang butuh perbaikan.

“Trotoarnya sudah banyak yg rusak, kita ganti yang baru agar terlihat rapi dan mengembalikan fungsinya,” ujar Sazali saat dikonfirmasi, Selasa (2/11).

Lebih lanjut Sazali mengatakan, untuk perbaikan trotor di Jalan Kepu Timur Raya ini dikerjakan oleh enam orang petugas dan ditargetkan langsung selesai pada hari ini juga.

“Panjang sekitar 10 meteran, tadi petugas meratakan dengan pasir terlebih dahulu, setelah itu ditutup konblok,” ungkapnya.

Intruksi / Informasi	Diteruskan / Kepada